

FORMULIR PERMOHONAN

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Medan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Di_
M E D A N

Permohonan ini disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mendapatkan persetujuan PERUBAHAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL atas ketentuan yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Pendaftaran Penanaman Modal dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.

Perizinan yang akan diubah : Nomor

sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

Alasan perubahan :

.....

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : *(Direksi/Komisaris/Pimpinan)* dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan *(Nama Perusahaan)* dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri ini diperbuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan,,

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Materai Rp.6.000

(.....)
Nama dan Jabatan

PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

No	LAMPIRAN PERMOHONAN	PETUGAS
I. KETERANGAN PEMOHON		
1.	Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;	
2.	Rekaman Pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM;	
3.	Rekaman NPWP perusahaan;	
4.	Bukti diri seluruh pemegang saham, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 351 1382 393">a. Rekaman KTP; <li data-bbox="164 393 1382 436">b. Rekaman NPWP; <li data-bbox="164 436 1382 530">c. Dalam hal pemegang saham adalah Perusahaan agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan NPWP; 	
II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL		
5.	Keterangan rencana kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 610 1382 680">a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; <li data-bbox="164 680 1382 750">b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; <li data-bbox="164 750 1382 789">c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 	
6.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.	
7.	Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan.	
8.	Dokumen Pendukung lainnya;	
9.	Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan	
III. DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN		
10.	Rekaman Perizinan yang dimiliki dan perubahannya.	
11.	LKPM periode laporan terakhir (untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki izin);	
12.	Perubahan Rencana Permodalan : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 1183 1382 1398">a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk : Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (<i>waarmerking</i>) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notari. Yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham. <li data-bbox="164 1398 1382 1440">b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada; <li data-bbox="164 1440 1382 1505">c. Apabila ada perubahan nama pemegang saham, melampirkan <i>certificate change of name</i> atau sejenisnya; 	
13.	Perubahan Nama Perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 1552 1382 1736">a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (<i>waarmerking</i>) oleh Notaris; atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notari. Yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham. <li data-bbox="164 1736 1382 1796">b. Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM 	
14.	Perubahan NPWP : melampirkan Rekaman NPWP Baru	
15.	Perubahan Alamat Perusahaan dan/atau Lokasi Proyek : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 1886 1382 1928">a. Surat keterangan domisili dan/atau Sertifikat Hak Milik; <li data-bbox="164 1928 1382 1953">b. Perjanjian sewa menyewa; 	
16.	Perubahan Bidang Usaha dan Jenis Produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 2001 1382 2070">a. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; <li data-bbox="164 2070 1382 2140">b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan; <li data-bbox="164 2140 1382 2165">c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan; 	
17.	Perubahan nilai investasi, luas tanah atau tenaga kerja : melampirkan Alasan detil dan jelas mengenai perubahan dari pimpinan perusahaan;	
18.	Perpanjangan masa berlaku :	
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="164 2277 1382 2320">a. Bukti progress kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini; <li data-bbox="164 2320 1382 2374">b. Alasan detil dan jelas mengenai permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek dari pimpinan perusahaan; 	